

Kepentingan Prancis dalam Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya

Gaizcha Hermano Da Ajauro

Abstrak

Gelombang Musim Semi Arab di Libya terjadi pada tahun 2011 yang dimulai dengan demonstrasi karena penangkapan aktivis hak asasi manusia oleh pemerintah Libya. Banyak pihak yang terlibat dalam konflik internal di Libya, salah satunya NATO dan Prancis, untuk menggulingkan Pemerintah Moammar Ghaddafi yang sudah berkuasa lebih dari 41 tahun. Prancis memiliki keterlibatan yang besar dalam intervensi kemanusiaan di Libya. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO dengan alasan kemanusiaan justru berbanding terbalik dengan kenyataannya. Intervensi kemanusiaan yang berbanding terbalik dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa Prancis memiliki kepentingan dibalik Intervensi di Libya. Penulisan ini dalam pembuatannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber literatur dan data-data yang sudah ada. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui alasan dibalik keterlibatan Prancis serta kepentingannya. Kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Dengan sumber data yang sudah dikumpulkan seperti buku, jurnal, dokumen elektronik dan lainnya, data ini akan dianalisis untuk menjelaskan tentang kepentingan Prancis dalam intervensi kemanusiaan di Libya.

Kata Kunci: NATO, Prancis, Intervensi, Kepentingan, Libya

Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011 dimulai dengan aksi protes oleh sejumlah pengunjuk rasa di beberapa titik kota Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011 (BBC 2011). Aksi protes yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut dikarenakan penangkapan seorang aktivis yang dikenal kritis terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa tersebut berkembang menjadi aksi protes terhadap pemerintah Libya yang dipimpin oleh Moammar Gaddafi saat itu yang sudah berkuasa lebih dari 41 tahun. Para pengunjuk rasa menginginkan Moammar Ghaddafi turun sebagai pemimpin dan menyerukan untuk melakukan pemilu. Aksi unjuk rasa tersebut berkembang secara masif ke seluruh negeri, pada tanggal 17 Februari terjadi protes besar-besaran yang membuat Gaddafi cemas. Kemudian Gaddafi memerintahkan kepada pasukannya untuk mencegah para pengunjuk rasa yang protes sehingga hal tersebut berujung pada kerusuhan.

Masifnya protes terhadap dirinya, Gaddafi berusaha mempertahankan kepemimpinannya dengan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan dengan cara apapun yang diperlukan dan menggunakan kekuatan militer serta membatasi ruang gerak para pengunjuk rasa dengan cara memutus jaringan telekomunikasi. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Gaddafi membuat ketegangan semakin menjadi-jadi sehingga menimbulkan konflik bersenjata dan pemberontakan antara pemerintah di bawah pimpinan Gaddafi dan kelompok oposisi.

Pihak oposisi mendirikan pemerintahannya sendiri dengan nama National Transitional Council (NTC) pada 27 Februari 2011 yang dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan, yaitu Mustafa Abdul Jalil dan berpusat di Benghazi. Moammar Gaddafi semakin cemas dan terancam sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan apapun bagi mereka yang melawannya. Dengan perintah tersebut, banyak yang menjadi korban dan tercatat

hampir 1000 orang yang menjadi korban jiwa dari peristiwa tersebut (BBC, 2011). Tindakan yang dilakukan oleh Khaddafy tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Statuta Roma (Court, 2011)

Menanggapi tindakan kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Gaddafi, Dewan Keamanan PBB memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap Libya dengan mengembargo militer dan pembekuan asset yang dikeluarkan melalui Resolusi 1970. Dalam resolusi tersebut terdapat juga pengajuan Gaddafi ke Mahkamah Internasional (BBC 2011), tetapi Khaddafy tidak menanggapi hal itu. Kemudian PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 untuk mengantisipasi berlanjutnya pelanggaran HAM yang terjadi di Libya. Berdasarkan Resolusi tersebut, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) mendapatkan mandat dari PBB untuk melakukan *Humanitarian Intervention* untuk menciptakan keamanan dan kedamaian terhadap negara-negara yang sedang konflik di dunia, khususnya di Libya pada saat itu (Bagaskara 2019).

Dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO, Prancis merupakan salah satu negara yang terlibat cukup besar dalam konflik di Libya selain Amerika Serikat. Prancis merupakan negara yang menyarankan ide untuk melakukan larangan terbang pada wilayah udara Libya. Ide tersebut terdapat dalam Resolusi 1973 yang berisi tentang zona pelarangan terbang (*no-fly zone*) di wilayah udara Libya. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh DK PBB setelah mendapat tekanan dari Liga Arab. *No-fly zone* bertujuan untuk mencegah pesawat-pesawat tempur pasukan pemerintah Gaddafi melakukan pembunuhan melalui udara dan resolusi 1973 juga berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil dari pasukan Gaddafi (Indrawan 2013).

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan koalisi NATO dianggap menjadi salah satu kepentingan dari beberapa negara saja, termasuk Prancis, terlihat dari beberapa kasus dan bahkan intervensi yang dilakukan oleh NATO sendiri bertolak belakang dari tujuan utamanya yaitu menyelamatkan manusia dan menciptakan perdamaian. Serangan-serangan yang dilakukan oleh NATO dengan alasan untuk menyelamatkan warga sipil tidak begitu berjalan dengan baik, justru sebaliknya, jumlah korban bertambah banyak sejak terjadinya intervensi kemanusiaan. Apakah intervensi ini benar-benar untuk menegakkan hak asasi manusia dan menciptakan perdamaian atau ada faktor lain, seperti kepentingan-kepentingan lain yang menjadi penyebab intervensi ini? Jurnal ini akan membahas problem-problem terkait kepentingan Prancis dari intervensi yang dilakukan oleh NATO serta apa saja kepentingannya sehingga Prancis ikut serta dalam konflik Libya.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metodologi penelitian sendiri merupakan proses serangkaian untuk melakukan sebuah penelitian. Metode kualitatif merupakan metode penelitian untuk memahami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan pada suatu konteks khusus alamiah (Moleong 2005). Metode kualitatif secara sederhananya merupakan metode yang memiliki tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan mengungkap.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, seperti jurnal, buku, maupun dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan mempelajari, mengumpulkan, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, serta berbagai dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Pemilihan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi latar belakang kebijakan-kebijakan yang diambil Prancis dalam keterlibatannya di Libya.

Dengan metode kualitatif dan studi pustaka, konflik ini dianalisis menggunakan cara pandang realisme dalam menjelaskan kepentingan nasional dan kebijakan yang dilakukan oleh Prancis guna menjawab pertanyaan penelitian terkait keterlibatan Prancis dalam konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011.

Tinjauan Pustaka

Ada beberapa kajian pustaka yang menjadi rujukan penulis untuk memudahkan agar penjelasan mengenai poin-poin penting dalam penelitian ini bisa tersampaikan dengan baik. *Pertama*, jurnal yang berjudul “Kepentingan Amerika dan Prancis dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya pada Tahun 2011” ditulis oleh Andhika Ishtianto Utomo pada 2018. Jurnal yang ditulis oleh Andhika ini membahas tentang bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dan Prancis dalam intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011. Dalam jurnalnya, Andhika menjelaskan tentang faktor-faktor penting yang menjadikan Amerika dan Prancis terlibat dalam intervensi kemanusiaan, dalam hal ini NATO, di Libya. Keterlibatan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan Amerika dan Prancis terhadap negara Libya, sehingga mereka terlibat dalam intervensi yang mana NATO sebagai mediana. Intervensi NATO yang pada mulanya untuk meminimalisir korban dan menyelamatkan warga sipil ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan, di mana sejak masuknya NATO di Libya justru korban sipil terus bertambah. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa ada beberapa kepentingan yang dimiliki AS maupun Prancis dalam konflik di Libya, yaitu sumber daya alam khususnya minyak yang mana Muammar Gaddafi ingin menasionalisasikan perusahaan-perusahaan minyak sehingga membuat Amerika Serikat maupun Prancis terlibat dalam intervensi kemanusiaan ini, kemudian faktor politik, dan yang terakhir untuk menurunkan rezim Muammar Gaddafi. Penelitian di atas memiliki poin-poin penting dalam penelitian penulis, yaitu terkait dengan kepentingan Prancis dalam intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011 sehingga penulis mengambil rujukan dari jurnal tersebut.

Kedua, buku berjudul “*National Interest in International Relations Theory*” yang ditulis oleh Scott Burchill (2005). Dalam bukunya, Scott Burchill dalam bukunya menawarkan sebuah diskusi mengenai berbagai perspektif dalam HI. Dalam bukunya, Burchill menjelaskan konsep kepentingan nasional dalam berbagai perspektif, seperti marxis, realis, liberal, dll. Burchill juga menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan sebuah negara dan dilandaskan oleh kekuasaan yang negara tersebut miliki. Burchill juga memberikan cara pandang mengenai kepentingan nasional sehingga tidak dilihat sebagai aksi kekerasan pembenaran suatu negara. Konsep kepentingan nasional menurut Burchill digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri sebuah negara dan mereka menggunakan istilah untuk melakukan pembenaran atas perilaku negara di ranah internasional. Buku di atas sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian, di mana dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai konsep kepentingan nasional yang mana berguna untuk menganalisa perilaku negara, dalam hal ini negara Prancis dalam keterlibatannya di Libya pada tahun 2011.

Ketiga, jurnal yang berjudul ‘Mewaspada Pembajakan Operasi Perdamaian: Telaah Kritis Intervensi Asing dalam Konflik Libya’ ditulis oleh Nuruddin Al Akbar. Jurnal ini membahas tentang operasi kemanusiaan dan menganalisis misi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO. Jurnal ini juga menelusuri tentang pembajakan terhadap operasi kemanusiaan ini. Jurnal ini juga memberikan contoh nyata tentang adanya pembajakan yang terjadi di beberapa konflik, salah satunya dilakukan oleh NATO. Pada konflik Libya dijelaskan bahwa ada pihak ketiga dalam aksi yang menegakkan misi kemanusiaan tersebut, terlihat dari hirauan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian terhadap gencatan yang diminta oleh Gaddafi dan hirauan dari pasukan perdamaian terkait usulan yang diberikan oleh Uni

Afrika mengenai konsep peta jalan damai kepada NTC dan Gaddafi. Menurut Nuruddin, Jika solusi yang ditawarkan Uni Afrika dijalankan, maka transisi kekuasaan akan berjalan damai dengan upaya dialog dari pihak-pihak yang bertikai. Dapat dikatakan misi perdamaian yang dilakukan bukanlah menyelesaikan konflik, tetapi menciptakan konflik baru. Misi perdamaian tidaklah sesuai apa yang terjadi di lapangan. Hal ini terjadi karena banyak masuk kepentingan-kepentingan lain yang bisa merubah perdamaian itu sendiri. Jurnal ini dapat membantu penulis menganalisa tentang pembajakan yang dilakukan oleh NATO dan masuknya kepentingan-kepentingan dari pihak ketiga, dalam hal ini Prancis.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Jerry Indrawan pada 2013 dengan judul 'Legalitas dan Motivasi NATO dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. Jurnal ini menjelaskan mengenai apakah NATO berhak atas intervensi yang dilakukan pada konflik Libya tahun 2011, kemudian di dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai apa saja motivasi NATO dalam melakukan Intervensi di Libya. Pro dan kontra terhadap intervensi yang dilakukan NATO dalam konflik di Libya diperdebatkan. Menurut Jerry dalam jurnalnya, keikutsertaan NATO dalam konflik di Libya merupakan bentuk perpanjangan tangan dari sebuah negara lain dan untuk alasan politis yang mana hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi. Menurut Jerry, tindakan NATO mengintervensi Libya dikarenakan beberapa kepentingan dari pihak ketiga, yaitu kepentingan geopolitik dan menguasai minyak. Tidak hanya itu, intervensi NATO di Libya juga bertujuan untuk menurunkan pemimpin Libya yang lagi berkuasa saat itu, Muammar Gaddafi. Menurut Jerry, legalitas hukum seharusnya digunakan demi keselamatan manusia. Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam penelitian penulis terkait dengan intervensi NATO di Libya yang mana tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan kekuasaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemimpin Libya, Muammar Gaddafi.

Kerangka Berpikir

Untuk menganalisis kepentingan Prancis dalam intervensi kemanusiaan NATO di Libya, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional.

- (1) Pertama konsep kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan nyata yang dibuat oleh pengambil keputusan di suatu negara, seperti presiden atau menteri luar negeri, kepada negara lain atau aktor lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang direpresentasikan dalam kepentingan nasional (Plano 1999). Menurut Rosseau (1976), dalam bukunya yang berjudul Politik Dunia, ia menjelaskan bahwa politik luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara melalui sikap dan kegiatannya untuk memanfaatkan lingkungan eksternal dari negara tersebut.
- (2) Konsep kedua yang digunakan yaitu konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional tidak terlepas dari negara, karena kepentingan nasional itu sendiri merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan negara. Konsep ini diambil karena konsep kepentingan nasional menjadi dasar untuk menjelaskan maupun menganalisis perilaku negara di luar negeri (Plano 1999). Menurut Waltz, kepentingan nasional merupakan tanda otomatis yang akan memerintah para pemimpin negara untuk bertindak dan mereka akan menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasional negara itu sendiri (Jackson & Sorensen 2005)

Perspektif Prancis Di Libya

Posisi Prancis di Libya sangat jelas terlihat bagaimana pernyataan Presiden Nicolas Sarkozy dalam pidatonya di pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang dilaksanakan di Paris (*Summit Paris*) yang membahas situasi di Libya setelah penetapan resolusi 1973 oleh PBB.

Pernyataan tersebut berisi “Kami akan mengakhiri bab kediktatoran dan peperangan, serta memulai iklim kerja sama dengan Libya yang demokratis. Ini merupakan tekad Perancis, mendukung upaya rakyat menuju demokrasi.” (DW 2011) Pernyataan ini menjelaskan, bahwa Prancis ingin menunjukkan mereka secara terbuka menggunakan nilai-nilai HAM dan demokrasi untuk mengakhiri pemerintahan Ghaddafi dan menggunakan nilai-nilai HAM dan demokrasi sebagai legitimasi untuk melakukan intervensi di Libya.

Terlepas dari hal di atas, kondisi masyarakat sipil yang terjadi di Libya sangat memprihatinkan, di mana diberitakan oleh banyak media massa bahwa banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Gaddafi serta menimbulkan banyak warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban. Jika merujuk pada pernyataan Presiden Nicolas Sarkozy, pernyataan tersebut tidak lebih dari sekadar untuk menyelesaikan masalah HAM yang terjadi karena pemerintahan otoriter Ghaddafi. Selain itu juga, resolusi yang 1973 yang dikeluarkan PBB juga menjadi alat untuk mengintervensi Libya.

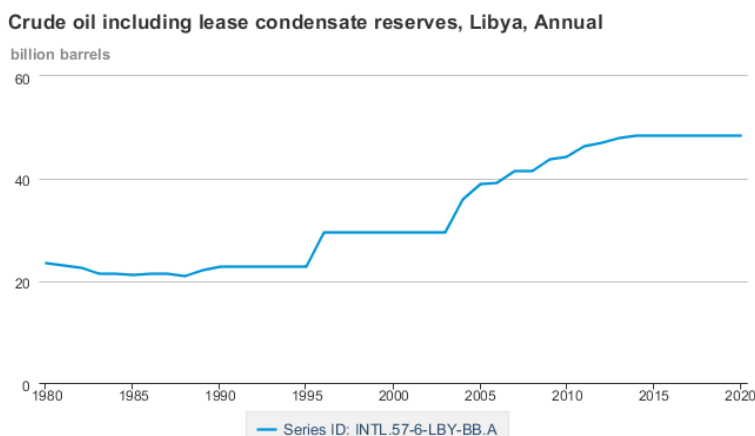
Kepentingan Prancis di Libya

Ada beberapa faktor atau kepentingan yang membuat Prancis melakukan intervensi di Libya, yaitu faktor ekonomi untuk menjaga suplai dan cadangan minyak dan faktor politik.

1. Faktor ekonomi, mempertahankan dan menjaga suplai minyak.

Timur Tengah dan Afrika merupakan kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah minyak. Kebutuhan minyak bumi di dunia semakin hari semakin bertambah, sedangkan jumlah minyak yang ada semakin berkurang sehingga kenaikan harga minyak semakin hari semakin mahal. Libya merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan cadangan minyak yang melimpah dengan kualitas minyak yang sangat bagus, di dalamnya terdapat kandungan minyak dan gas yang manis membuat harganya lebih mahal (eia.gov, 2012). Libya merupakan negara yang memproduksi dua persen kebutuhan minyak bumi dunia, sekitar 2,6 juta barrel minyak per hari. Menurut National Oil Corporation (NOC) pada tahun 2009 Libya memproduksi 1,6 juta barrel minyak per hari dan mendapatkan pemasukan yang tinggi yaitu sekitar 35 milyar US Dollar (Republika 2011).

Gambar 1. Cadangan minyak mentah Libya



 Source: U.S. Energy Information Administration

Sumber : (Energy Information Administration (eia.gov))

Ada peningkatan produksi minyak yang cukup drastis di Libya. Libya mampu meningkatkan 1 juta barrel per hari, namun jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara kaya minyak di Jazirah Arab yang mampu menghasilkan 2,5 juta barrel per hari. Ini menjadi salah satu hal yang membuat jumlah cadangan minyak masih sangat banyak sehingga diprediksi akan habis sampai dengan 70 atau 71 tahun ke depan (eia gov, 2012).

Ada beberapa teori *socioeconomic* yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang penting yang bisa digunakan untuk mengkaji tindakan suatu negara. Kebutuhan negara maju akan minyak seperti Prancis dapat mempengaruhi ekonomi negaranya. Oleh karena itu, Libya sebagai penyuplai minyak bagi negara-negara maju seperti Prancis sangat penting. Prancis setidaknya memiliki 8 perusahaan minyak yang beroperasi di Libya, seperti Forex, Elf, CGG dan lain-lain (Directorate of Intelligence). Perusahaan-perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Libya termasuk juga perusahaan minyak Prancis yang berada puluhan tahun memiliki kontrak untuk mengolah minyak mentah yang ada di Libya, bahkan banyak perusahaan minyak besar berharap Libya mau membuka investasi lebih lanjut

Setelah dicabutnya sanksi Washington pada tahun 1994 dan perusahaan-perusahaan minyak besar asal Eropa dan Amerika mulai memasuki Libya. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Libya, di bawah pimpinan Gaddafi, mengatur ulang jatah perusahaan-perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Jatah minyak dari ladang setiap perusahaan mengalami pengurangan yang dari awalnya 50% menjadi hanya 12% saja. Gaddafi mengungkapkan alasannya mengapa ia melakukan hal tersebut, ia hanya berusaha untuk memberikan keuntungan yang diperoleh dari minyak Libya untuk rakyatnya sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengontrol bisnis minyak di Libya sejak puluhan tahun dan mereka telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Menurutnya, mulai sekarang keuntungan yang diperoleh dari minyak harus dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Inilah yang menyebabkan intervensi Prancis dan negara-negara Barat melalui NATO ke Libya. Gaddafi juga sering kali menaikkan biaya dan pajak sehingga menyulitkan perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Libya (Indrawan, 2013).

Dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Gaddafi tentu saja membuat perusahaan-perusahaan akan kehilangan kontrolnya, hal ini menyulitkan dan membuat perusahaan-perusahaan asal Amerika dan Eropa khawatir mengenai keberlangsungan pengolahan minyak mereka. Dengan kekhawatiran itu mendorong Prancis maupun Amerika melalui NATO mengintervensi dan menggulingkan pemerintahan Gaddafi. Menurut analisis ekonomi, wajar sekali jika berbagai pihak mencurigai adanya agenda tersembunyi berupa intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya yaitu negara Prancis dan Amerika melalui NATO terhadap pemerintah Libya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Prancis berniat untuk menguasai minyak di Libya melalui NATO (Roberts, Adam, 1993).

Prancis dalam kepentingannya melakukan intervensi terhadap Libya menjadikan sektor energi, terutama minyak sebagai tujuan utamanya. Prancis ingin mendapatkan bagian minyak yang lebih besar dan ingin menguasainya, hal ini terlihat dari surat kabar elektronik atau *e-mail* yang dikirim oleh Presiden Sarkozy kepada Hillary Clinton. Dalam surat kabar elektronik tersebut berisi tentang kepentingan-kepentingan Prancis yang terdiri dari beberapa poin, salah satunya yaitu untuk menguasai dan mendapatkan keuntungan dari sektor minyak yang ada di Libya (Hoff, 2011).

2. Faktor Politik

Faktor politik menjadi alasan penting Prancis untuk melakukan intervensi terhadap Libya. Prancis memiliki kepentingan politik, yaitu ingin mempertahankan pengaruh politiknya di

beberapa negara Afrika. Tujuannya untuk mencegah Gaddafi melanjutkan rencana jangka panjangnya yaitu untuk menggunakan nilai tukar Dinar Emas sebagai alat tukar yang berlaku di Afrika. Jumlah cadangan emas yang dimiliki Gaddafi diperkirakan mencapai 143 ton emas, emas ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti mata uang CFA Franc. Prancis sendiri menggunakan mata uangnya yaitu CFA Franc sebagai alat tukar dan mata uang tetap di negara bekas jajahannya yang mana bertujuan untuk mengintegrasikan semua negara bekas jajahan dalam perekonomian serta mengontrol sumber daya alam yang ada di bawah kuasa Prancis. Mata uang Prancis yaitu CFA Franc sudah lama digunakan di 12 negara jajahan Prancis di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Rencana Presiden Ghaddafi untuk menggantikan mata uang CFA Franc dengan Dinar Emas sebagai mata uang resmi jika terlaksana akan menyebabkan Prancis kehilangan pengaruhnya di Afrika, oleh karena itu Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy memutuskan untuk ikut campur dalam konflik di Libya (Hoff 2016).

Selain untuk menanamkan pengaruhnya di Afrika, keterlibatan Prancis dalam intervensi terhadap Libya juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan popularitas Prancis di mata keanggotaan Uni Eropa (Andhika, 2018). Hal tersebut sangat penting bagi Prancis untuk memperkuat posisinya di dalam Uni Eropa mengingat setelah terjadinya krisis yang terjadi di dalam Uni Eropa yang dimulai sejak tahun 2009 yang membuat posisi Prancis tidak cukup signifikan dalam keanggotaan Uni Eropa. Setelah terjadinya krisis, Jerman menjadi negara yang paling dominan di dalam keanggotaan Uni Eropa dengan menggunakan kekuatan ekonominya, mereka membentuk ulang institusi tersebut sesuai dengan standar yang mereka gunakan. Hal ini jelas membuat Prancis hanya memiliki sedikit peran, bahkan bisa dibilang hanya sebagai pendukung terhadap keputusan-keputusan yang diambil Jerman, salah satunya kebijakan-kebijakan yang diambil dan dibuat Jerman terkait dengan krisis yang terjadi pada Uni Eropa pada saat itu. Salah satu tujuan Prancis melakukan intervensi kemanusiaan melalui NATO di Libya yaitu untuk menegaskan dan menaikkan kredibilitas mereka untuk menunjukkan bahwa posisi mereka masih penting di Eropa, khususnya menunjukkan kepada negara Jerman bahwa mereka masih memiliki kapabilitas secara militer maupun politik dan mampu untuk memimpin Eropa. Kemudian Prancis melakukan tindakan mengenai hal ini dengan membentuk koordinasi dengan Inggris terkait dengan keputusan mengintervensi Libya pada tanggal 2 November 2010 sebagai reaksi dari kekuatan politik dan ekonomi yang begitu besar yang dimiliki oleh Jerman. Dengan kata lain Prancis tidak ingin hanya menjadi pendukung dalam keanggotaan Uni Eropa, mereka ingin memiliki peran penting untuk mengambil keputusan maupun kebijakan-kebijakan di dalam Uni Eropa (Stratfor, 2013).

3. Menghentikan rezim Ghaddafi

Dalam pidatonya di pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan di Paris, Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menyatakan bahwa ia akan mengakhiri masa kediktatoran Presiden Ghaddafi dan mendukung upaya rakyat Libya menuju demokrasi (DW, 2011). Keterlibatan Prancis dalam intervensi terhadap Libya juga bertujuan untuk membuktikan bahwa Prancis yang mengidentitaskan dirinya sebagai pelindung HAM, membuat mereka melakukan ikut campur dalam konflik Libya yang mana Libya telah banyak melakukan pelanggaran HAM. Juru bicara Dewan Transisi Nasional militer (NTC), Khalid al-Sherif mengatakan kepada pers pada Senin, 26 September 2011, bahwa ia menemukan 1.200 kuburan massal manusia di kompleks penjara Abu Salim, Tripoli (Tempo, 2011). Korban penembakan terbanyak merupakan para narapidana politik dan juga ulama yang menolak rezim Khadafi. Semua berawal dari keharusan menggulingkan pemerintahan Khadafi yang telah mengabdikan lebih dari 40 tahun dan menimbulkan konflik bersenjata selama 8 bulan, dari Februari hingga Oktober 2011 (Wheeler, 2000).

Kebijakan Luar Negeri Prancis

Prancis merupakan suatu negara yang memiliki pengaruh kuat dalam konstelasi politik dunia. Dinamika politik dunia yang berubah dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan politik keamanan global maupun isu-isu konflik kontemporer yang mana persoalan-persoalan tersebut menarik intervensi Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam politik dunia.

Kebijakan luar negeri Prancis pada pemerintahan Sarkozy sebagian besar didorong oleh dirinya sendiri dan istana kepresidenan Elysee. Sebagai panglima tertinggi, Sarkozy juga memiliki peran untuk mengambil keputusan akhir mengenai kebijakannya.

Dalam kasus Libya, sebenarnya Presiden Sarkozy pernah berhubungan dengan Moammar Ghaddafi yang mana Ghaddafi ikut mendanai kampanye Sarkozy untuk memenangkan pemilunya pada tahun 2007 (Felix 2019). Namun, hal tersebut tidak membuat tindakan Presiden Sarkozy terhadap Libya lemah. Prancis merupakan negara yang berada di garis depan dalam konflik di Libya, bisa dilihat melalui kebijakan Presiden Sarkozy dengan memimpin seruan agar zona larangan terbang di Libya dilakukan (Nicolas Watt, Patric 2011) dan pengakuan pertama oleh negara Prancis yang mengakui Dewan Transisi sebagai pemerintah sah Libya merupakan pembuktian bahwa Prancis memiliki kepentingan yang sangat serius dalam konflik Libya.

Prancis juga merupakan pencetus dibuatnya Grup Kontak Libya. Menteri Luar Negeri Prancis, Alain Juppe, mengusulkan tentang komite pengarah politik, yaitu mengumpulkan para menteri luar negeri dari negara-negara yang terlibat dalam operasi militer di Libya (George 2011). Grup Kontak Libya akhirnya didirikan pada konferensi London tanggal 23 Maret, grup tersebut merupakan upaya internasional untuk berkordinasi dan membahas dukungan pasca konflik. Kemudian di dalam forum tersebut juga mempertemukan berbagai organisasi internasional maupun pemerintah seperti PBB, Uni Eropa, NATO, OKI, dan Liga Arab. Inisiatif Prancis memberikan kordinasi politik kepada Grup Kontak Libya berarti bahwa itu tidak berada di bawah kendali NATO.

Pada awalnya, Prancis menentang NATO untuk mengambil alih komando operasi ke Libya dan Prancis lebih suka dipimpin oleh koalisi dengan Inggris maupun AS. Hal tersebut dilihat Sarkozy sebagai kesempatan bagi Prancis dan Inggris untuk bergabung setelah perjanjian pertahanan bilateral pada 2010. Prancis berpandangan bahwasannya dengan kepemimpinan NATO mengambil alih komando operasi akan membuat negara-negara Arab melihat aliansi sebagai instrumen kekuasaan AS. Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Prancis, Alain Juppe, mengatakan pada 21 Maret, *“the Arab League does not wish the operation to be entirely placed under NATO responsibility”*. Penolakan NATO tersebut berlandaskan kekhawatiran mengenai proses birokrasi akan memperlambat semuanya serta kekhawatiran tentang kebebasan bertindak Prancis akan dibatasi (Madelene Lindstorm 2012). Walaupun demikian, tidak dapat dihindarkan bahwa intervensi NATO juga bisa dibilang sebagai kepanjangan tangan dari Prancis demi mencapai kepentingannya di Libya.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Libya yang dipimpin oleh pemerintahan Gaddafi pada tahun 2011 dinilai sebagai salah satu kejahatan yang dilakukan oleh rezim Moammar Gaddafi. Perbuatan Ghaddafi terhadap kubu oposisinya ditentang oleh masyarakat internasional karena dalam konflik tersebut ia menggunakan kekuatan militer dan menimbulkan banyak korban jiwa yang bisa dibilang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Konflik yang awalnya hanya konflik internal berubah menjadi isu internasional akibat tindakan represif Ghaddafi terhadap kubu oposisi. Hal ini menimbulkan respon dari dunia internasional, salah satunya yaitu tindakan intervensi kemanusiaan yang bertujuan menghentikan konflik

dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Ghaddafi. Intervensi tersebut diimplementasikan dalam resolusi PBB tahun 1970 dan 1973. Resolusi tersebut berisi mengenai larangan zona terbang (*no-fly zone*), pembekuan aset maupun blokade yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Ghaddafi. Intervensi yang dilakukan oleh NATO juga tidak terlepas dari kepentingan suatu negara, khususnya Prancis.

Kepentingan nasional dinilai sebagai salah satu faktor intervensi Prancis ke Libya. Demi mencapai kepentingan nasional tersebut Prancis sangat menekankan untuk mendukung kubu oposisi dari pemerintahan Ghaddafi, terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Prancis melalui Presiden Sarkozy sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Prancis. Kebijakan Prancis sebagai negara pertama yang menyarankan Grup Kontak Libya serta negara yang menyarankan dilarangnya penerbangan di atas wilayah Libya (*no-fly zone*) bahkan Prancis merupakan negara yang menyerang langsung pasukan Ghaddafi melalui Jetnya yang membuat ia dikritik. Kebijakan frontal Prancis tersebut menandakan bahwasannya Prancis memiliki kepentingan yang sangat penting di Libya sehingga Prancis melakukan intervensi.

Ada beberapa faktor kepentingan yang menyebabkan Prancis melakukan intervensi terhadap Libya, yaitu faktor ekonomi (minyak), faktor politik, dan kepentingan untuk menggulingkan rezim Ghaddafi. Cadangan minyak yang sangat banyak yang dimiliki Libya menjadi faktor pendorong Prancis mengintervensi Libya. Sebagai salah satu negara maju Prancis membutuhkan minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhannya maupun sebagai industrinya. Selain itu, faktor politik yang menyebabkan intervensi Prancis terhadap Libya karena Ghaddafi berencana ingin memperluas pengaruhnya dengan menggantikan mata uang Prancis di negara bekas jajahan Prancis, hal ini membuat Prancis khawatir dan takut kehilangan pengaruhnya di kawasan Afrika. Faktor ketiga yaitu Prancis ingin menghentikan rezim Ghaddafi yang sudah berkuasa selama 40 tahun lebih dan bersifat otoriter. Presiden Sarkozy dalam pidatonya juga ingin menghentikan kediktatoran Ghaddafi dan mendukung upaya masyarakat Libya menuju demokrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional (terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Lindström, Madelene dan Kristina Zetterlund. 2012. Setting the Stage for the Military Intervention in Libya. FOI.
- Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nicholas J. Wheeler. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. New York: Oxford University Press.
- Plano, JC, dan Olton, R. 1999, *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin
- Rosenau, JN, Boyd, G., & Thompson, KW. 1976. Politik Dunia: Pengantar, New York, Pers Gratis.
- Stratfor. 2011. Special Series: European Libya's Intervention. Stratfor Global

Intelligence

Jurnal Ilmiah

Indrawan, Jerry. 2013. Legalitas dan Motivasi NATO dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 4, No. 2. hal 127-149

Roberts, Adam . 1993. Humanitarian war: Military intervention and human rights. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol. 69, Number. 3. pg. 431

Utomo, Andhika. 2018. Kepentingan Amerika Serikat dan Prancis dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya pada Tahun 2011. *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 822- 831*

Laporan Resmi

Rome Statute. 1998. *International Criminal Court*. Secretary-General of United Nations

Artikel Daring

BBC. 2011. “Unjuk Rasa Muncul di Libya. Tersedia di: https://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest.shtml [diakses pada: 11 oktober 2020]

EIA.GOV 2012. Tersedia di: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=7110> july 2012, [diakses: 12 oktober 2020]

EIA.GOV. 2012. “Analysis, Countries, Libya”. Tersedia di: <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=LY> [diakses pada: 12 oktober 2020]

Junghas, Daniela dan Luky Setriyani. 2011. “Paris Gelar Konferensi Pendukung Libya”. Tersedia di : <https://www.dw.com/id/paris-gelar-konferensi-pendukung-libya/a-15358407> 2011 1/9 [diakses pada :11 okt 2020]

Purwoko, Krisman. 2011. “Berapa Banyak Kekayaan Khadafi Tersimpan”. Tersedia di: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/02/26/166305-berapa-banyak-dan-di-mana-kekayaan-khadafi-tersimpan-> [diakses pada: 12 okt 2020]

Hoff, B., 2016. “Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Intervention”. [Online] Diakses Dari: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/>

Tempo.co. 2011, “Kuburan Massal ditemukan di Tripoli”. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2011/09/27/119358433/Kuburan-Massal-Ditemukan-di-Tripoli> [diakses pada 12 okt 2020]

Al Jazeera. 2011 “Questions remain over NATO role in Libya”

“France’s Juppe Proposes Political Committee for Libya Mission”, *Bloomberg*, 22 March 2011.

<https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/>